

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan mengesampingkan permasalahan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Malioboro terlebih dahulu, Malioboro merupakan salah satu tempat yang spesial dan ikonik dari Kota Yogyakarta. Hampir seluruh wisatawan Jogja selalu meramaikan tempat tersebut ketika sedang berwisata ke Yogyakarta. Pada dasarnya, Malioboro ini merupakan sebuah nama jalan yang memiliki dua ruas, yaitu utara dan selatan. Bagian Utara merupakan Jalan Margoutomo (Pangeran Mangkubumi) sedangkan bagian Selatan merupakan Jalan Malioboro dan Jalan Margomulyo (Jend. Ahmad Yani). Kedua ruas jalan tersebut membentang dari Tugu Jogja hingga Titik Nol atau perempatan Kantor Pos Yogyakarta dengan dibatasi oleh jalur Kereta Api Stasiun Tugu. Sepanjang jalan itu lah disebut dengan kawasan Malioboro yang sangat identik dengan Kota Yogyakarta. Sepanjang Jalan Malioboro terdapat berbagai macam tempat mulai dari tempat usaha, tempat wisata, dll. Seperti misalnya, Pasar Beringharjo, Angkringan Kopi Jos, Malioboro Mall, Museum Benteng Vredeburg, dll. Sehingga tak heran apabila Malioboro menjadi pusat wisata Kota Jogja dan selalu ramai.

Gambar 1 Pasar Beringharjo
(2018)



(sumber: detik.com)

Gambar 2 Jalanan Malioboro (2022)



(sumber: suarajogja.id)

Dilansir KOMPAS.com (Cahya, 2020), wisatawan Malioboro pada tanggal 20—23 Agustus 2020 mampu mencapai angka sekitar 18.375. Sedangkan pada saat itu beriringan dengan pandemi Covid-19 yang mana hampir di seluruh tempat dilakukan pembatasan pengunjung.

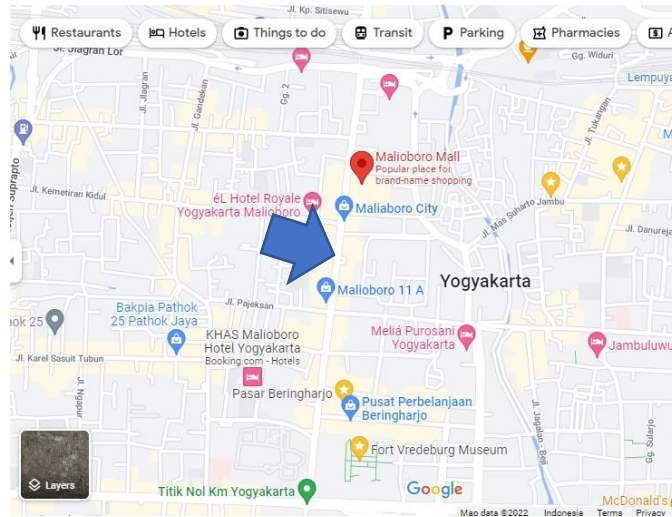
Dalam kedua ruas jalan Utara dan Selatan pun berbeda, ruas jalan Selatan memiliki tempat-tempat yang lebih banyak dan beragam. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, tempat-tempat seperti Pasar Beringharjo, Malioboro Mall, dan Museum Benteng Vredenburg terdapat pada ruas jalan selatan. Sehingga pada ruas selatan tersebut memiliki volume yang besar dan selalu ramai wisatawan. Seperti misalnya Benteng Vredenburg, melalui (Statistik Kepariwisata 2019), terdapat sekitar 471.368 pengunjung¹. Statistik tersebut pun merupakan pengunjung objek wisata museum dengan jumlah tertinggi². Pengunjung Jalan Malioboro ruas selatan pun pastinya lebih dari angka tersebut karena belum tentu

¹ Benteng Vredenburg menggunakan tiket masuk sehingga mudah dianalisis pengunjungnya.

² Hanya terdapat satu museum lainnya yang meraih angka ratusan ribu, yaitu De Mata Art Museum dengan 243.445 pengunjung.

semua pengunjung Jalan Malioboro ruas selatan merupakan pengunjung Benteng Vredenburg juga.

Gambar 3 Letak ruas jalan selatan



(sumber: maps.google.com)

Pada ruas selatan juga memiliki volume pertokoan dan PKL yang sangat besar. Bahkan pertokoan dan PKL tersebut pun memiliki usaha yang bervariasi, mulai dari kerajinan, obat-obatan, makanan, dsb. Tak hanya itu, saat ini pun di sepanjang jalan tersebut juga memiliki tempat rekreasi dan spot untuk berfoto. Dengan adanya tempat-tempat usaha, bangunan-bangunan tua hingga tempat rekreasi yang variatif tersebut mampu menjadi “kearifan lokal” atau karakteristik Jalan Malioboro. Kearifan lokal sendiri adalah segala bentuk kebijaksanaan yang didasari oleh nilai kebaikan yang bisa dipercaya, diterapkan dan senantiasa dijaga secara turun temurun oleh sekumpulan orang dalam wilayah tertentu yang menjadi habitat mereka sehari-hari untuk hidup (Njatrijani, 2018). Segala sesuatu yang terletak pada Jalan Malioboro itu lah bisa dikatakan sebagai kearifan Jalan malioboro, termasuk PKL yang sangat banyak, kendaraan lokal seperti delman, keramaian yang ada, dll. Orang-orang yang pernah

berwisata ke Malioboro tentunya tidak akan melupakan terhadap karakteristik yang telah lekat dengan Jalan Malioboro tersebut. Hal tersebutlah yang terus dilestarikan turun temurun untuk menjaga citra dari Jalan Malioboro bagi masyarakat dan tetap menjadi kearifan bagi Jalan Malioboro maupun Kota Jogja. Hal tersebut juga tak lepas dari letak Malioboro yang terletak pada pusat Kota Jogja. Sehingga Jalan Malioboro tersebut sangat ramai wisatawan dan pelaku usaha.

Akan tetapi, tidak selamanya karakteristik suatu wilayah merupakan hal yang positif bagi suatu wilayah tersebut. Apabila kearifan lokal dalam diri Jalan Malioboro tersebut kurang memuaskan dan dapat diperbaiki agar lebih baik, pemerintah pun berhak mengubahnya dengan menetapkan kebijakan baru. Misalnya, keramaian yang ada di Jalan Malioboro akibat adanya parkir kendaraan-kendaraan di bahu jalan hingga menyebabkan terbatasnya ruang bagi wisatawan dan pedestrian untuk menikmati jalanan Malioboro. Bahkan jalannya pun sangat ramai dan tidak teratur. Apabila mengacu pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 pada Bab VII pasal 10 ayat 2, Jalan Mangkubumi, Jalan Malioboro, dan Jalan Ahmad Yani diperuntukkan khusus bagi area pejalan kaki (pedestrian). Sehingga pemerintah pun berhak membenahi parkir tersebut jika mengganggu jalur pedestrian walaupun itu harus mengubah suasana Malioboro sebelumnya.

Pada akhirnya, pemerintah melakukan penataan ruang dengan memindahkan tempat parkir kendaraan bermotor yang tadinya berada di sisi timur sepanjang Jalan Ahmad Yani ke Tempat Khusus Parkir Abu

Bakar Ali (TKP ABA) pada 2016 silam yang menjadikan Malioboro sebagai semi-pedestrian. Menurut (Prayuda, Priyo, Salsabila, & Kasiwi, 2020) kebijakan tersebut pun membawa dampak bagi pedestrian. Seperti, Jalanan Malioboro terlihat lebih rapi, bersih, dan memiliki lebih banyak ruang untuk berjalan walaupun wisatawan pun harus berjalan terlebih dahulu dari parkir yang memakan waktu dan tenaga lebih dari sebelumnya. Namun, salah satu tujuan dari hal tersebut adalah agar jalanan Malioboro lebih bisa dinikmati dan tidak mengganggu pedestrian. Sedangkan menurut (Sholekhah, 2018), adanya relokasi tersebut memberikan dampak juga bagi juru parkir yang mana terjadi penurunan pendapatan dan pengurangan jam kerja.

Kejadian hampir serupa terjadi kembali pada Februari tahun 2022, ketika adanya relokasi PKL melalui Surat Edaran Nomor 430/1.131/SE.Disbud/2022 tentang Penataan Kawasan Khusus Pedestrian di Jalan Malioboro dan Jalan Margomulyo. Maksud kedua jalan tersebut adalah jalan yang terletak pada ruas selatan. Jadi kawasan Malioboro yang direlokasi atau ditata kawasan khusus pedestriannya ada pada ruas selatan. Surat Edaran tersebut berlandas pada:

1. SE Gubernur Nomor 3 tentang Penataan Kawasan Khusus Pedestrian di Jalan Malioboro dan Jalan Margo Mulyo
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 tahun 2022 tentang Pencabutan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2010 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Kawasan Khusus Malioboro – A. Yani.

Dalam hal ini, pemerintah merelokasi setidaknya 1.800 PKL (Wicaksono, 2022) yang telah menjadi kearifan atau karakteristik Malioboro ke Teras Malioboro 1 (depan Pasar Beringharjo) dan 2 (sebelah gedung DPRD DIY). Hal ini yang menjadi titik utama polemik suatu entitas yang telah dikenal sebagai ikon Yogyakarta, yaitu Malioboro. Sebelumnya, relokasi tersebut mendapat penolakan dari Asosiasi Pedagang Kaki Lima Yogyakarta (APKLY) pada akhir tahun 2021. Dilansir dari laman resmi DPRD DIY (Admin, DPRD DIY, 2021), pada Desember 2021 PKL melalui APKLY, Wawan Suhendra, mengunjungi Komisi B DPRD DIY. Ia melakukan penolakan adanya relokasi tersebut karena kekhawatiran mereka apabila nantinya relokasi tersebut berdampak terhadap penurunan pendapatan mereka, meskipun dalam berita tak dijelaskan secara detail terkait estimasi nominal kerugian tersebut. Namun, penurunan tersebut secara realistis sangat mungkin terjadi karena momentum dan persiapan yang dinilai kurang tepat. Sebab, seperti diketahui bahwa adanya Covid-19 ini telah berdampak hampir kepada semua aspek, termasuk berpengaruh terhadap penurunan pendapatan PKL karena minimnya wisatawan ketika Covid-19. Bahkan PKL pun meminta agar relokasi ditunda atau diberi waktu hingga setelah Idul Fitri 2022 agar para PKL ibaratnya dapat *recovery* atau pemulihan terlebih dahulu. Sebab biasanya pada Idul Fitri itu lah wisatawan DIY melonjak sehingga dapat berpengaruh terhadap pengunjung Malioboro.

Berdasarkan yang dijelaskan Wawan Suhendra dalam laman resmi DPRD DIY tersebut, dapat dilihat bahwa sosialisasi pun terlihat carut marut

dalam pelaksanaannya. PKL menganggap pemerintah tampak buru-buru dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut yang mana sosialisasi masih sangat minim dari segi pelaksanaannya dan jaminannya. Bahkan, pemerintah juga tidak memberikan data pengunjung dan ekonomi/pendapatan untuk memberikan jaminan terhadap para PKL. Sehingga mereka menganggap tidak perlu diadakannya relokasi tetapi lebih ditata. Bahkan, Wawan menganggap selama ini PKL mampu menjalankan kegiatannya dengan harmonis dan tidak mengganggu elemen lainnya. Kemudian atas dasar adanya penolakan melalui perwakilan PKL tersebut, maka DPRD DIY dengan Pansus Pengawasan Relokasi PKL Malioboro menyampaikannya kepada Pemerintah DIY pada Januari 2022 dalam sebuah pertemuan. Namun, pada awal bulan Februari tahun 2022, pemerintah secara resmi melakukan relokasi berdasarkan Surat Edaran Nomor 430/1.131/SE.Disbud/2022, sembari menunggu Pergub yang dikeluarkan oleh Sri Sultan HB X.

Sri Sultan Hamengkubuwono X melakukan relokasi tersebut dengan berbagai alasan yang masuk akal. Berdasarkan berita yang dilansir dari laman nasional.tempo.co, terdapat 4 alasan utama Sri Sultan HB X melakukan relokasi, pertama adalah beliau telah menunggu waktu yang lama selama 18 tahun untuk menata kawasan Malioboro dengan jalur pedestriannya. Sehingga beliau tidak ingin relokasi tersebut diundur kembali. Kedua, para PKL dinilai tidak menempati lokasi yang seharusnya karena mereka menggunakan jalur pedestrian dan area pertokoan yang dimiliki pemerintah untuk lapaknya. Sehingga hal tersebut merupakan hal

yang salah. Ketiga, relokasi tersebut bertujuan untuk menciptakan sistem jaringan pedestrian yang lebih berkualitas dari sebelumnya. Bahkan juga untuk membuka aksesibilitas Jalanan Malioboro, ruas selatan, menjadi pusat pelayanan kota. Keempat, adanya rencana Kerjasama antara Pemda DIY dengan UNESCO untuk mengusulkan kawasan sumbu filosofis³ (garis imajiner) ke dalam warisan dunia. Secara garis besar, sumbu filosofis itu merepresentasikan keselarasan hubungan manusia dengan tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam. Dalam sumbu filosofis tersebut, di dalamnya terdapat Jalan Malioboro. Sehingga Sultan tidak ingin membiarkan lahan trotoar digunakan PKL jika itu melanggar hukum, Ia mengatakan "Saya tak mau dinilai melanggar hukum, dengan membuat kerjasama dengan UNESCO, tapi di dalam kerjasama itu saya justru membiarkan lahan trotoar area pertokoan untuk pejalan kaki dipakai PKL," dilansir dari nasional.tempo.co (Wicaksono, 2022)

Akan tetapi, berdasarkan observasi melalui media sosial, selang beberapa pekan relokasi tersebut, berbagai masalah pun muncul. Seperti, dalam akun TikTok, Tomrist, seorang News Anchor dan Moderator Debat Calon Presiden 2019 yang memiliki beberapa video terkait relokasi PKL Malioboro. Salah satunya adalah video yang diunggah pada tanggal 1 Maret 2022, Ia melakukan wawancara singkat dengan para pedagang di Teras Malioboro 1 dengan 1.3 juta *views* dan 84 ribu *love*. Beberapa pedagang di lantai 3 mengatakan jika kesulitan mendapatkan pembeli

³ Sumbu filosofis Yogyakarta adalah garis lurus yang membentuk garis imajiner pada titik Panggung Krapyak (awal), Keraton Yogyakarta (pusat), dan Tugu Pal Putih (akhir) (DIY B. P., 2019).

dikarenakan tidak mendapatkan lapak yang strategis dalam Teras Malioboro. Hal itu tak lain tak bukan karena struktur bangunan Teras Malioboro 1 yang tingkat dan penggunaan sistem undian bagi seluruh PKL baik pedagang makanan, cendera mata, maupun pakaian untuk mendapatkan lapaknya. Sehingga pedagang yang mendapatkan lapak diatas sulit didatangi pengunjung, parahnya ketika pedagang makanan mendapatkan lapak diatas yang mana makanan tidak dapat bertahan lama.

Salah satu PKL dalam wawancara singkatnya bersama Tomrist, menyatakan bahwa pengunjung dengan memiliki niatan membeli oleh-oleh akan mendatangi Teras Malioboro. Sedangkan jika berada di sepanjang jalan sebelumnya, wisatawan baik memiliki niatan membeli oleh-oleh atau tidak akan tetap melewati para pedagang dan dapat ditawari dagangannya, bahkan yang tadinya tidak berniat membeli dapat berubah pikiran untuk membeli dagangannya. Artinya dalam hal ini aktivitas ekonomi mengalami perubahan dibandingkan dengan sebelum relokasi. Sehingga hal ini berpotensi terjadinya penurunan pendapatan, terkadang pun terdapat pedagang yang tak memiliki pembeli dalam kurun waktu sehari. Dilansir dalam teraspers.uajy (Pradipta & Vianney, 2022), awak pers melakukan wawancara dengan beberapa PKL Teras Malioboro 1 dan 2, salah satu PKL di lantai 2 mengatakan bahwa “Dalam hal omzet jelas menurun jauh, tetapi karena lokasi lapak saya yang mudah dilihat pengunjung sehingga masih mending”.

Sedangkan di Teras Malioboro 2 pun memiliki masalah karena tempat yang bukan berbentuk bangunan seperti Teras Malioboro 1,

melainkan hanya lapak dengan menggunakan atap berupa baja ringan dan tanpa ada bentuk bangunannya. Bahkan lokasi tersebut memiliki dataran yang lebih rendah daripada jalanan Malioboro. Sehingga apabila terjadi hujan yang sangat deras pun dapat menggenangi area-area disekitaran teras tersebut. Dilansir dalam teraspers.uajy (Pradipta & Vianney, 2022), salah satu PKL Teras Malioboro 2 mengatakan bahwa kondisi Teras Malioboro ini cukup memprihatinkan karena memiliki suhu yang panas dan drainase yang buruk. Meskipun, Teras Malioboro 2 merupakan tempat sementara sebelum nantinya dipusatkan pada Teras Malioboro 1 ketika pembangunan rampung, tetapi seharusnya nasib para PKL dalam tenggat waktu tersebut juga diperhatikan. Kemudian, dilansir melalui tempo.co (Wicaksono, 2022), salah satu PKL, Supriyati, mengatakan bahwa “Pendapatan pedagang menurun. Kasarnya jika tadinya mendapat Rp 1 Juta dalam sehari, setelah adanya relokasi pendapatan bisa menurun hingga Rp 400 ribu per hari yang mana berjualan dari pagi ke malam.” Hal itu karena sulit terjangkau lapak para PKL oleh para wisatawan, terutama yang berada di pelosok samping/belakang. Pada intinya baik Teras Malioboro 1 maupun 2, memiliki kekurangan dalam hal lokasi lapak yang tak strategis, terutama lapak yang berada pada pelosok Teras Malioboro 1 dan 2. Sebab pastinya wisatawan belum tentu mengunjungi segala penjuru Teras Malioboro. Kekhawatiran PKL sebelum terlaksananya relokasi pun benar terjadi, yaitu adanya indikasi akan menurunnya pendapatan mereka, meskipun sebagian besar PKL tak menjelaskan secara rinci terkait besaran penurunan tersebut.

Kemudian menurut pandangan dari warganet berdasarkan analisis pada media sosial, khususnya dalam *video content TikTok* Tomrist, komentar-komentar dalam video tersebut terdapat ribuan dan dapat dilihat melalui dua sisi. Banyak komentar bernuansa negatif yang mana menuliskan bahwa kearifan dan suasana dari Malioboro telah hilang. Sebab, Malioboro terkenal dengan banyaknya PKL yang menyuguhkan wisatawan dengan usaha-usahanya di sepanjang Jalan Margomulyo. Dengan kondisi seperti itu (Teras Malioboro 1 dan 2), dianggap tak ada bedanya dengan Mall ataupun pasar tradisional. Walaupun demikian, terdapat juga beberapa komentar bernuansa positif terdapat para wisatawan atau pedestrian yang merasa puas karena saat ini lebih tertata rapi dan mendapatkan ruang lebih banyak ketika berjalan di jalanan Malioboro. Seperti telah dijelaskan di awal juga bahwa PKL tersebut memang merupakan ciri khas dari Jalanan Malioboro atau bahkan bisa disebut juga sebagai kearifan dari Malioboro. Namun, pemerintah juga berhak melakukan penataan ulang apabila hal tersebut bertujuan lebih baik, Sri Sultan HB X pun telah menjelaskan alasan-alasan yang masuk akal. Namun, di sisi lain pemerintah juga harus memerhatikan bagi mereka yang terdampak buruk akibat adanya relokasi tersebut. Apalagi PKL yang terdampak akibat relokasi tersebut, berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM DIY mencapai angka ribuan, yaitu 1929 PKL. Walaupun Pemerintah pun juga memberikan bantuan berupa pembebasan biaya retribusi Teras Malioboro selama 2 tahun pertama.

Penelitian ini dilakukan karena adanya problematika yang terjadi akibat relokasi tersebut. Pada awalnya memang para PKL melakukan penolakan-penolakan untuk merelokasi tempat dagangnya karena kekhawatirannya terhadap menurunnya pendapatan mereka dan juga aktivitas ekonomi yang berbeda dengan sebelumnya, tetapi pada akhirnya pemerintah menerbitkan surat edaran Nomor 430/1.131/SE.Disbud/2022 untuk melakukan kebijakan relokasi. Setelah beberapa bulan berlalunya relokasi tersebut pun, dilansir dalam kanal *youtube Tribun Jogja*, para PKLancam untuk kembali ke lapak lama apabila tempat relokasi tidak representative (TribunJogja, 2022).

Oleh karena itu, ketersediaan sarana dan prasarana dalam relokasi tersebut pun juga pantas untuk dianalisis. Peneliti ingin menganalisis perspektif pengelola dan upaya yang dilakukan pengelola kepada PKL selama di Teras Malioboro untuk menjelaskan melalui dimensi yang luas. Sebab melalui berbagai pemberitaan secara publik, upaya dan perspektif pengelola sangatlah jarang disentuh oleh peneliti. Hal ini yang menyebabkan munculnya narasi negatif atas kebijakan tersebut. Tentunya hal ini masih menjadi abu-abu karena minimnya informasi yang diketahui publik terkait perspektif pemerintah.

Di sisi lain, penelitian ini juga ingin melihat dari sudut pandang PKL yang terdampak dalam perekonomian dan pedestrian yang terdampak dari segi kepuasan. Dalam sisi pedestrian, hal ini salah satunya berfokus pada kenyamanan pedestrian sebagai pengguna tepi jalan malioboro. Sebelumnya, penataan kawasan malioboro ini dilakukan oleh pemerintah

daerah DIY untuk ditujukan sebagai kawasan semi-pedestrian. Upaya tersebut mulai gencar dilakukan setelah relokasi lahan parkir ke tempat parkir Abu Bakar Ali yang dibangun oleh pemda. Kemudian pemerintah mengembangkan penataan kawasan Malioboro dengan menyiapkan lokasi baru sebagai tempat para PKL setelah direlokasi. Latar belakang upaya pemerintah tersebut salah satunya adalah keberadaan PKL tersebut tentunya mengganggu kenyamanan pedestrian dan mencemari estetika jalan malioboro.

Ketidaknyamanan ini juga berdasarkan observasi secara langsung ketika mengunjungi jalan malioboro beberapa kali sebagai wisatawan yang ingin menikmati jalanan malioboro (pedestrian). Dengan banyaknya volume PKL pada saat itu, menjadikan suasana dan kenyamanan dalam berjalan menjadi terganggu. Bahkan, hingga kesulitan untuk mendapatkan ruang dalam berjalan karena dipadatnya oleh PKL dan juga pedestrian lainnya. Sedangkan para PKL pun kerap kali menawarkan barang dagangannya meskipun kita hanya berjalan dan tidak memiliki keinginan untuk membeli dagangan. Hal ini tentunya melahirkan kondisi *hectic* bagi para pejalan kaki. Tentunya hal ini tidak sesuai dengan prinsip jalur pedestrian yang tentunya harus memberikan ruang, kenyamanan, dan keamanan bagi pedestrian.

Dengan menganalisis dan meneliti melalui berbagai dimensi penelitian, yaitu pengelola, PKL, dan pedestrian maka terdapat hasil yang kompleks dalam penelitian ini. Setelah menganalisis dimensi diatas, pada akhirnya akan menilai efektivitas dari kebijakan tersebut beserta dengan

sub dimensi dalam efektivitas kebijakan. Oleh karena itu, penelitian ini melihat berbagai sisi dan dinamika dalam kebijakan ini secara proporsional. Hal ini untuk membuktikan terkait narasi negatif atas kebijakan tersebut yang muncul di publik. Sedangkan di sisi lain untuk melihat hal positif yang dapat diangkat dari kebijakan ini.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latarbelakang diatas maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. PKL merasa sosialisasi yang kurang baik dan terpaksa berpindah tempat setelah diberi surat edaran Nomor 430/1.131/SE.Disbud/2022 setelah sebelumnya melakukan penolakan.
2. Terdapat indikasi dampak ekonomi terhadap pedagang setelah adanya relokasi ke Teras Malioboro 1 dan 2 berdasarkan beberapa wawancara yang dilakukan oleh media.
3. Tempat yang tak strategis dalam Teras Malioboro 1 dengan gedung bertingkat 3 sehingga beberapa PKL di lantai 2 dan 3 dan bagian pelosok sulit terjangkau oleh para pengunjung.
4. Adanya pro kontra dari pedestrian, terdapat yang setuju karena merasa nyaman dan mendapatkan ruang untuk berjalan, tetapi terdapat juga yang tidak setuju karena menghilangkan kearifan Malioboro
5. Adanya kesulitan bagi pedagang untuk mendapatkan pengunjung, tidak seperti ketika sebelum dilakukan relokasi PKL

1.3. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kelayakan sarana dan prasarana dalam penataan kawasan khusus pedestrian di Malioboro bagi PKL dan pedestrian?
2. Bagaimana dampak penataan kawasan khusus pedestrian di Malioboro terhadap perekonomian PKL?
3. Bagaimana dampak penataan kawasan khusus pedestrian di Malioboro terhadap kepuasan pedestrian?
4. Bagaimana efektivitas kebijakan penataan kawasan khusus pedestrian di Malioboro?

1.4. Tujuan Penelitian

1. Menguji kelayakan sarana dan prasarana dalam penataan kawasan khusus pedestrian di Malioboro bagi PKL dan pedestrian.
2. Menganalisis dampak penataan kawasan khusus pedestrian di Malioboro terhadap perekonomian PKL
3. Menganalisis dampak penataan kawasan khusus pedestrian di Malioboro terhadap kepuasan pedestrian.
4. Menilai efektivitas kebijakan penataan kawasan khusus pedestrian di Malioboro

1.5. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberi sumbangan pemikiran akan problematika yang ada dalam relokasi PKL di Yogyakarta pada khususnya, dan di wilayah-wilayah lain di Indonesia pada umumnya.
- b. Memberi penambahan pengetahuan dan wawasan akan efektivitas pemerintah Jogja dalam melakukan relokasi PKL di Malioboro.
- c. Sebagai pijakan, landasan, atau referensi penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan relokasi PKL di Malioboro.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat memberikan kesempatan bagi peneliti untuk meneliti permasalahan sosial dengan menghubungkan ilmu yang diperoleh dalam perkuliahan, yaitu ilmu pemerintahan. Penulis dapat menilai efektivitas pemerintah atas kebijakan relokasi PKL di Malioboro

b. Bagi PKL

Penelitian ini bermanfaat bagi PKL di Malioboro untuk menyampaikan pandangannya akibat adanya relokasi dan mengetahui dampak yang terjadi. Sehingga mereka mendapatkan penjelasan dalam pengambilan keputusan kedepannya untuk turut mengatasi permasalahan yang mereka alami.

c. Bagi Pedestrian

Penelitian ini bermanfaat bagi pedestrian untuk menyampaikan pandangannya akibat adanya relokasi, alasan terjadinya relokasi dan saling memahami atas dampak yang terjadi.

d. Bagi Pemerintah

Penelitian ini bermanfaat bagi pemerintah untuk menjadi bahan pertimbangan, memecahkan masalah yang terjadi, dan memberikan sumbangsih pikiran ketika akan mengimplementasikan kebijakan relokasi kedepannya. Sebab, terkadang kebijakan relokasi yang diimplementasikan pemerintah terkadang kurang tepat hingga menimbulkan polemik, seperti relokasi parkir Malioboro ke TKP ABA, dan relokasi lainnya.

1.6. Penelitian Terdahulu

Dalam sebuah penelitian milik (Andrianto, 2012) dampak yang cukup terasa adalah dampak ekonomi. Para PKL merasakan penurunan pendapatan secara drastis. Hal itu disebabkan karena letak relokasi yang tak strategis. Dalam penelitian tersebut juga mengatakan bahwa faktor yang memengaruhi keberhasilan relokasi tersebut adalah sikap pelaksana, Komunikasi, Sumber daya, Kepatuhan dan Daya Tanggap Kelompok Sasaran.

Penelitian yang berjudul Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Kota Tegal, memaparkan bahwa hadirnya PKL di kawasan Jl. Sebayu (alun-alun) kurang tertata dengan rapih karena banyaknya pedagang yang hadir di tepi-tepi jalan yang membuat kawasan tersebut terlihat tidak rapih, kumuh, dan juga kotor akibat sampah yang ditimbulkan. Selain itu juga menjadi biang keladi kemacetan terutama pada saat malam hari atau hari libur yang disebabkan banyaknya

kendaraan yang parkir sembarangan (Widodo, Idayanti, Permanasari, & Sahri, 2016). Dalam penelitian artikel yang berjudul Dampak Sosial Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Wisata Kuliner Kota Tomohon memuat hasil bahwasannya pedagang PKL senang atas usaha pemerintah yang merelokasi tempat berjualan mereka yang semula di emperan toko, pinggir jalan, dan fasilitas publik lainnya. Para pedagang senang karena mendapatkan kepastian dan jaminan hukum, keamanan dan ketertiban usaha, kenyamanan dan kebersihan, persaingan antar pedagang, dan hubungan sosial antar pedagang yang menjadi lebih baik (Aotama & Klavert, 2021). Dari kedua penelitian tersebut bisa disimpulkan bahwa merelokasi PKL bisa sangat menguntungkan jika saling melibatkan saat membuat kebijakan.

Dalam hasil penelitian lainnya dengan judul Permasalahan Yang Dihadapi Pedagang Kaki Lima Pasca Relokasi di Sentra PKL Jalan Benteng Pancasila Kota Mojokerto, menjelaskan bahwa Permasalahan PKL di Sentra PKL Jalan Benteng Pancasila Kota Mojokerto pasca relokasi adalah permasalahan pemasaran, sarana dan prasarana dalam hal ini adalah sempit nya ukuran stan yang ditempati oleh para pedagang, serta kurangnya dukungan dari pemerintah dalam membantu mengatasi permasalahan yang ada (Rizky Prigionila & Lucky Rachmawati, 2019). Hal tersebut juga berkorelasi dengan apa yang terjadi di PKL Malioboro karena keluhan yang terjadi oleh PKL adalah kesulitan mendapat pelanggan karena keberadaan lapak yang sulit dicapai. Namun dalam penelitian yang berjudul Penataan Pedagang Kaki Lima Kuliner Untuk

Mewujudkan Fungsi Tata Ruang Kota Di Kota Yogyakarta Dan Kabupaten Sleman, memaparkan bahwa pola penataan PKL untuk mewujudkan kebermanfaatan tata ruang kota DIY sendiri dengan membuat kebijakan mengenai klasifikasi pola penataan PKL sesuai dengan program perencanaan tata ruang kota serta membuat kebijakan pola penataan PKL dengan lebih memperlihatkan aspek lingkungan hidup. Pemerintah Daerah telah memberikan kesempatan bagi para PKL untuk berjualan di sektor informal dan membuka lapangan kerja dari penerimaan pendapatan daerah dengan pemberlakuan retribusi (Puspitasari, 2010).

Penelitian dengan judul Dampak Relokasi Tempat Parkir Sisi Timur Jalan Malioboro-Ahmad Yani ke Tempat Khusus Parkir Abu Bakar Ali Kota Yogyakarta Terhadap Juru Parkir dan Konsumen Jasa Parkir, menyatakan hasil bahwa relokasi menimbulkan dampak negatif terhadap pendapatan juru parkir yang secara rata-rata menurun dan berdampak pada jam kerja juru parkir. Kemudian Relokasi menimbulkan dampak positif yaitu meningkatnya kepuasan konsumen jasa parkir (Sholekhah, 2018). Meskipun hampir serupa dengan melihat unsur pendapatan dan kepuasan. Namun, dalam penelitian tersebut tidak dijelaskan kaitannya atau implikasinya terhadap PKL dan pedestrian. Sebab, penelitian tersebut berfokus pada subjek penelitian yang berbeda, yaitu juru parkir dan konsumen jasa parkir.

Suatu hal yang membedakan atau menjadi gap pada enam penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah melihat situasi kondisi PKL serta melihat dari perspektif dan upaya pemerintah melalui pengelola

Teras Malioboro 1. Waktu kejadian pada relokasi ini pun juga baru saja terjadi pada awal tahun 2022, sehingga masih minimnya penelitian terkait relokasi PKL di Malioboro tersebut. Kemudian pemerintah menggunakan salah satu alasan yaitu kerjasama internasional yang mana dengan UNESCO terkait warisan budaya berupa sumbu filosofis.

Perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya juga adalah perbedaan lokasi keberadaan PKL dan tentunya Malioboro yang menjadi destinasi utama atau ikon dari Kota Jogja. Meskipun salah satu penelitian dilaksanakan pada lokasi yang sama, tetapi tema penelitian tersebut adalah relokasi parkir. Berbeda dengan penelitian ini yang berfokus pada relokasi PKL, bahkan hingga melibatkan sekitar 1.929 PKL. Sehingga hal tersebut yang membedakan dan menjadi celah penelitian ini dengan sebelumnya. Penelitian ini juga ingin melihat efektivitas pemerintah Jogja dalam melakukan kebijakan relokasi terhadap PKL dan pedestrian.

Berdasarkan studi literatur dengan metode kualitatif (Pratiwi, Sari, & Praditya, 2022), relokasi ini dapat berdampak pada segi ekonomi para PKL, yaitu mempengaruhi pendapatan mereka karena adanya ketimpangan dalam hal lokasi yang kurang strategis dan persaingan pedagang. Serupa dengan penelitian (DP, Sejati, Hilma, Dewi, & Nisa, 2022) menyatakan bahwa relokasi ini berdampak pada penurunan pendapatan apabila dibandingkan dengan sebelum relokasi. Selain itu, penelitian (Septian, 2022) lebih menekankan sisi positif dengan adanya upaya untuk

mentransformasi konflik pada PKL, yaitu perubahan personal, relasional konstruktif, structural, dan kultural antara PKL dengan pihak lainnya.

Sedangkan perbedaan penelitian kali ini dengan ketiga penelitian tersebut adalah jangka waktu penelitian yang lebih lama setelah adanya kebijakan tersebut dibandingkan penelitian sebelumnya yang mayoritas dilakukan beberapa bulan setelah adanya relokasi. Penelitian kali ini menganalisis gambaran yang terjadi setelah hampir dua tahun kebijakan tersebut dilakukan dan upaya yang telah dan akan dilakukan pengelola untuk meningkatkan kualitas pedagang itu sendiri. Sebab perspektif pemerintah tampak tidak pernah dibahas di penelitian lain terkait relokasi di Malioboro ini, peneliti lain hanya bersifat searah terhadap PKL.

Selain itu, penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan melihat beberapa aspek lainnya berupa upaya pengelola dalam mengelola Teras Malioboro 1 serta menganalisis dari sisi pedestrian. Sehingga penelitian ini memiliki cakupan atau ruang lingkup yang lebih luas. Dengan metode kualitatif tersebut maka data yang dihasilkan akan lebih dalam dan aktual.

1.7. Landasan Teori

1.7.1. Efektivitas Kebijakan

Kebijakan menurut (Kemendikbud, KBBI Bijak, 2022), diartikan sebagai suatu rangkaian konsep dan asas yang akan menjadi garis besar dan sebagai dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, serta cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi,

dan sebagainya) sebagai pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau sebagai garis pedoman untuk melakukan manajemen dalam usaha mencapai sasaran yang ditargetkan. Sedangkan kebijakan publik menurut Carl Friederich dalam (Nugroho, 2012) merupakan tindakan yang diusulkan oleh pemerintah dalam suatu lingkungan dengan peluang dan ancaman yang ada, memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan menurut (Anderson dalam (Wahab, 2014)) adalah suatu tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi

Efektivitas menjadi salah satu kriteria keputusan yang digunakan sebagai tolok ukur pemecahan masalah kebijakan. Menurut (Dunn, 1998) efektivitas adalah alternatif dalam menilai tindakan dalam mencapai hasil yang diharapkan, atau untuk mencapai tujuan di bawah aspek rasionalitas teknik serta selalu diukur dari unit produk atau layanan. Dalam pelaksanaan kebijakan, efektifitas diukur dari keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada kebijakan publik. Maka yang dimaksud dalam efektivitas kebijakan adalah keberhasilan implementasi kebijakan yang ada yang diperoleh secara tepat waktu, tepat sasaran, serta memenuhi target dari tujuan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, kebijakan relokasi PKL ke Teras Malioboro 1 dan dikaji untuk mengetahui apakah kebijakan tersebut sudah cukup efektif terutama bagi PKL itu sendiri, kenyamanan pejalan kaki, serta estetika jalanan Malioboro.

1.7.2. Indikator Efektivitas Kebijakan

Pelaksanaan program atau kegiatan memerlukan suatu pengukuran untuk mengetahui progres dan efisiensi pencapaian program tersebut. Efektif tidaknya suatu program atau kegiatan dapat diukur dengan konsep efektivitas. Konsep efektivitas ini menekankan bagaimana tercapainya suatu sasaran yang berjalan sesuai dengan waktu dan tujuan untuk memperoleh kualitas program yang direncanakan. Menurut (Wibawa, 1994), terdapat beberapa indikator efektivitas kebijakan publik, antara lain waktu pencapaian, tingkat pengaruh yang digunakan, perubahan perilaku manusia, pelajaran yang diperoleh dari pelaksanaan proyek, serta tingkat kesadaran manusia akan kemampuan dalam pelaksanaan program. Selain itu, (Steers dalam (Sutrisno, 2010)) mengemukakan bahwa efektivitas kebijakan dapat dilihat dari tiga konsep yang tidak terlepas satu sama lain, yaitu (1) optimalisasi tujuan, optimalisasi tujuan ini dinilai menurut ukuran seberapa jauh tujuan-tujuan program dapat dicapai, (2) perspektif sistem, pelaksanaan kebijakan perlu menggunakan sistem yang terbuka, saling terhubung dan bergantung satu sama lain, (3) tekanan pada segi perilaku manusia dalam pelaksanaan program, perilaku manusia menjadi dasar dalam pencapaian tujuan karena menggunakan perilaku manusia sebagai sumber daya dalam Bergeraknya suatu program.

Sedangkan menurut (Sutrisno, 2010) terdapat beberapa indikator yang perlu dipenuhi untuk menilai keefektivitasan suatu program atau kebijakan, antara lain:

- a. Pemahaman program, yaitu realisasi program yang mana program dapat berjalan lancar apabila esensi terkait program dipahami oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Bahkan, termasuk para sasaran program agar esensi program tersebut dipahami dan meminimalisir adanya misinformasi terkait program tersebut. Sehingga kebijakan tersebut nantinya dapat berjalan dengan baik tanpa adanya konflik yang terjadi.
- b. Ketepatan target, yaitu sasaran atau target yang dituju dari kebijakan tersebut harus tepat atau sesuai dengan aturan yang telah ditentukan agar program dapat berjalan efektif. Sehingga para sasaran menyadari bahwa mereka adalah pihak/target kebijakan tersebut dan mereka merasakan adanya kebijakan tersebut.
- c. Ketepatan waktu, yaitu waktu yang ditentukan untuk melakukan kebijakan tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Apabila waktu yang diambil untuk melaksanakan kebijakan tersebut tepat maka akan semakin efektif kebijakan yang dilakukan.
- d. Tercapainya tujuan, yaitu tujuan-tujuan dari kebijakan tersebut tercapai dan memberikan efek secara komprehensif. Apabila hal tersebut tercapai maka kebijakan tersebut akan semakin efektif.

e. Perubahan nyata, apabila target atau sasaran kebijakan semakin merasakan adanya perubahan yang nyata atas kebijakan tersebut. Maka kebijakan tersebut akan semakin dikatakan efektif.

Dalam penelitian ini akan menggunakan kelima indikator (Sutrisno, 2010) tersebut karena kesesuaian dengan dimensi-dimensi yang akan diteliti dan kondisi di lapangan.

1.7.3. Relokasi PKL dan Manfaat Relokasi PKL

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, relokasi merupakan pemindahan tempat rencana industri pada suatu daerah (Depdikbud, 1982). Relokasi adalah proses pemindahan lahan pedagang dari suatu tempat menuju ke tempat lain karena adanya penyimpangan dari para pedagang atau melakukan pengalihfungsian terhadap pedagang, pemindahan ini tidak dilakukan dengan begitu saja, tetapi juga memerhatikan tempat pemindahan tersebut agar tetap dapat memberikan berbagai manfaat atau nilai tambah bagi pedagang jika dibandingkan dengan sebelum relokasi.

Menurut (Wet, 2002) dalam tulisannya yang berjudul “The Experience with Dams and Resettlement in Africa”, hasil yang diharapkan dari proses relokasi adalah agar kondisi masyarakat yang direlokasi menjadi lebih baik dari kondisi sebelum terjadi relokasi. Adanya relokasi yang dilakukan pun tentunya memberikan berbagai manfaat. Misalnya seperti kemakmuran, kenyamanan, stimulasi, afiliasi serta moralitas

Sedangkan PKL adalah mereka yang melakukan kegiatan usaha dagang perorangan atau kelompok yang dalam menjalankan usahanya menggunakan tempat-tempat fasilitas umum, seperti terotoar, pinggirpingir jalan umum, dan lain sebagainya (Damsar, 2002). Artinya relokasi tersebut merupakan proses pemindahan PKL dari suatu tempat yang biasanya secara hukum dilarang ke tempat lainnya agar lebih efektif dan efisien. Memang relokasi tersebut diperlukan apabila pedagang melakukan penyimpangan karena dapat merugikan orang lain dan tidak sesuai dengan konstitusi, tetapi perlu diketahui juga bahwa pemerintah tetap harus memerhitungkan berbagai aspek agar para pedagang tetap sejahtera atau bahkan lebih sejahtera.

1.7.4. Dampak Ekonomi Kebijakan

1.7.4.1. Dampak Ekonomi

Dengan adanya kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu relokasi atau penataan kawasan khusus pedestrian di Malioboro, hal ini melahirkan adanya dampak yang dirasakan oleh para PKL. Salah satunya adalah adanya indikasi menurunnya pendapatan para PKL. Sehingga hal ini berarti relokasi PKL sebagai kebijakan menimbulkan dampak ekonomi. Dampak ekonomi (Stynes dalam (Disbudpar, 2013)) memiliki beberapa indikator, yaitu (1) *Direct Effect* yang terdiri penjualan, kesempatan kerja, pendapatan pajak, dan tingkat pendapatan, (2) *Indirect Effect*, meliputi perubahan tingkat harga, perubahan mutu dan jumlah barang dan jasa,

perubahan dalam penyediaan properti dan variasi pajak, serta perubahan sosial dan lingkungan, (3) *Induced Effects*, yaitu pengeluaran rumah tangga, dan peningkatan pendapatan.

Selain itu dampak ekonomi menurut (Cohen dalam (Dwi, 2015)) adalah adanya dampak terhadap pendapatan, aktivitas ekonomi, dan pengeluaran. Sedangkan kebijakan (Anderson dalam (Wahab, 2014)) adalah suatu tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi. Artinya kebijakan ini merupakan suatu produk yang dihasilkan oleh aktor (pemerintah) yang menghasilkan dampak ekonomi bagi para PKL, salah satunya adalah adanya indikasi menurunnya pendapatan mereka.

1.7.4.2. Pendapatan

Menurut KBBI, pendapatan adalah hasil kerja (usaha dan sebagainya) (KBBI Pendapatan, 2022). Kemudian menurut (Sochib, 2018), pendapatan adalah adanya arus masuk aktiva yang mana berasal dari barang/jasa yang disediakan oleh unit usaha selama periode tertentu. Jadi pendapatan ini pada intinya adalah penerimaan atau penghasilan dari para produsen/pemilik usaha atas hasil jasa/barang yang dijual oleh mereka. Sehingga ibarat adanya balas jasa atas usaha barang/jasa yang disediakan produsen dalam jangka waktu tertentu.

Dalam hal ini produsen yang dimaksud adalah PKL Malioboro selaku pedagang yang terdampak relokasi. Penelitian ini ingin meneliti terkait pendapatan PKL akibat adanya relokasi PKL Malioboro. Tujuannya adalah untuk melihat apakah terdapat perbedaan pendapatan dengan sebelum relokasi atau tidak. Pendapatan yang dimaksud dalam hal ini adalah penghasilan yang didapatkan PKL dalam jangka waktu tertentu, yaitu penghasilan kisaran per harinya agar lebih mudah diperhitungkan oleh para PKL.

1.7.5. Kepuasan Pedestrian

1.7.5.1. Kepuasan Konsumen

Teori kepuasan konsumen digunakan dalam penelitian ini untuk menilai tingkat kepuasan dari para pedestrian, sebagai konsumen, atas adanya kebijakan relokasi PKL Malioboro. Sebab penataan kawasan khusus pedestrian ini akan berpengaruh terhadap pedestrian yang merupakan pengguna dari Jalan Malioboro. Menurut (Kotler, 2012) kepuasan konsumen adalah adanya perasaan senang atau kecewa dari para konsumen dengan membandingkan kinerja suatu produk (hasil kerja) yang dihasilkan dengan ekspektasi mereka. Sehingga kepuasan konsumen adalah sikap ataupun perasaan dari para konsumen terhadap produk yang dikonsumsi. Jadi apakah dampak dari kinerja/produk yang

dihasilkan sesuai dengan harapan mereka sehingga memberikan kesenangan atau kekecewaan bagi para konsumen.

Dalam penelitian ini, pemerintah diibaratkan sebagai produsen. Sedangkan produk yang dihasilkan adalah suatu kebijakan yang diimplementasikan oleh pemerintah, yaitu relokasi PKL Malioboro. Kemudian, konsumen ditujukan kepada pedestrian karena dimensi yang ingin diteliti adalah kepuasan pedestrian dan dampak ekonomi bagi PKL. Kepuasan pedestrian diteliti karena ingin mengukur seberapa besar pedestrian yang senang dan kecewa atas kebijakan pemerintah terkait relokasi PKL. Sebab dalam media sosial terungkap pro kontra seperti yang dijelaskan dalam latarbelakang, seperti misalnya terdapat yang merasa senang karena akan mendapatkan ruang yang lebih banyak ketika berjalan dan terdapat yang kecewa karena merasa kearifan Malioboro telah hilang.

1.7.5.2. Pedestrian dan Tujuan Jalur Pedestrian

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan pejalan kaki adalah adalah setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu Lintas Jalan (BPK, 2017). Sedangkan menurut KBBI, Pedestrian adalah pejalan kaki (KBBI Pedestrian, 2022). Oleh karena itu dibutuhkan jalur untuk pejalan kaki tersebut. Tujuan jalur pedestrian adalah untuk kenyamanan, keamanan, kemudahan,

kesejahteraan, dan keindahan bagi pejalan kaki. Sehingga perlu adanya kebijakan untuk memberikan prioritas utama bagi pedestrian dari kendaraan bermotor dengan jalur pedestrian tersebut. Prioritas utama adalah memberikan rasa aman, kenyamanan, dan estetika (Mirsa, 2012).

Pada intinya jalur pedestrian harus diprioritaskan bagi pejalan kaki. Hal tersebut pada intinya untuk memberikan keamanan bagi pejalan kaki dan bisa berpengaruh terhadap kepuasan atau psikologis wisatawan. Oleh karena itu, adanya jalur pedestrian di Malioboro tersebut diperlukan untuk jalur pedestrian agar mendapatkan ruang ketika berjalan kaki, apalagi dengan keindahan Malioboro di malam hari menjadikan adanya ruang tersebut sangat memberikan estetika bagi para pedestrian. Atau bisa juga justru menghilangkan estetika atau kearifan dari Malioboro itu sendiri. Adanya penelitian ini pun untuk menguji teori tersebut mampu memberikan efektivitas dan efisiensi atau tidak.

1.7.5.3. Sarana dan Prasarana Jalur Pedestrian

Jalur pedestrian memerlukan sarana dan prasarana yang memadai agar tujuan dari jalur pedestrian tersebut dapat tercapai. Pedestrian harus mendapatkan rasa aman, nyaman, dan keindahan dari jalur pedestrian yang ada. Hal ini agar dapat menciptakan rasa humanisme terhadap pedestrian di suatu tempat. Menurut,

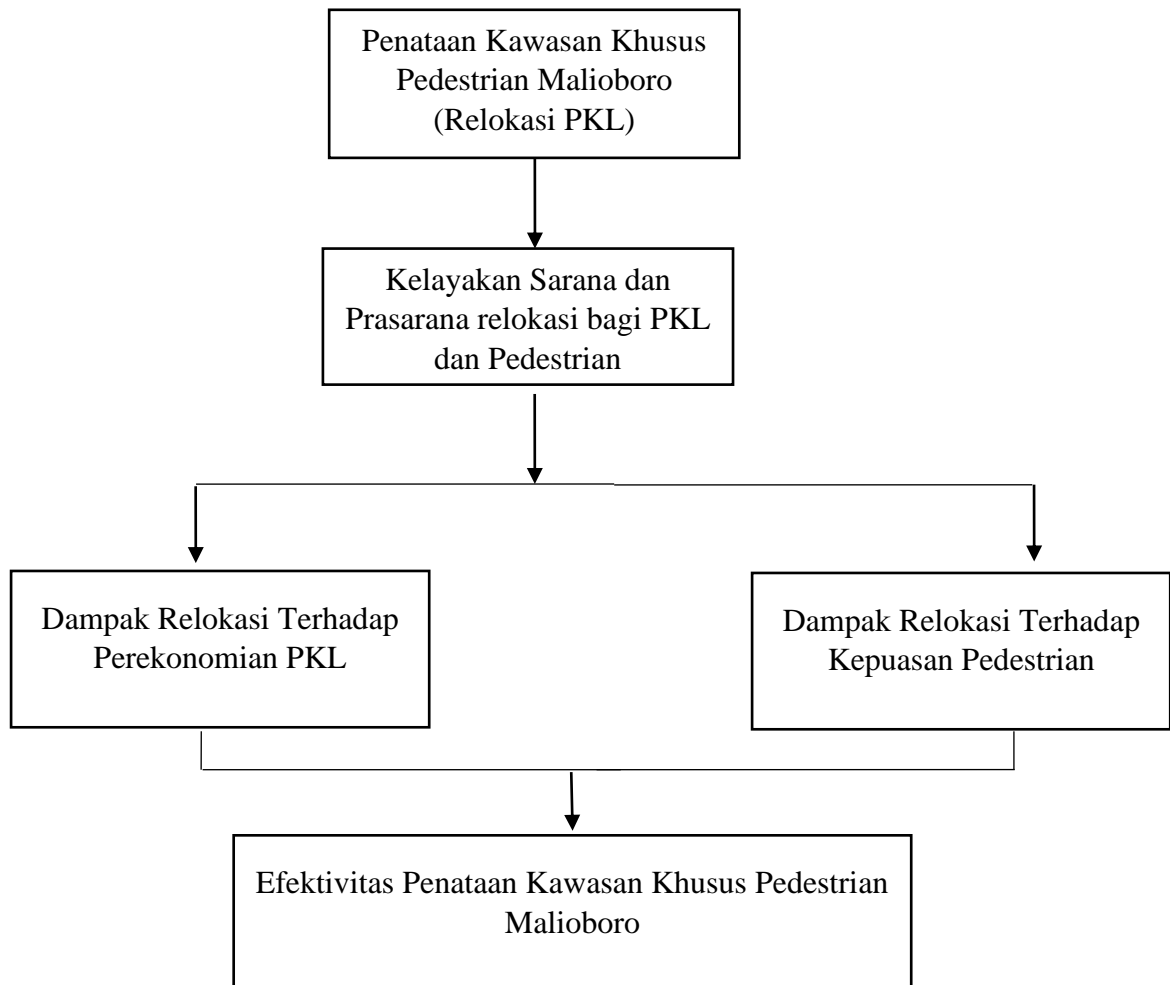
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 03/PRT/M/2014, prasarana pedestrian adalah fasilitas utama berupa jalur khusus yang diperkeras yang disediakan untuk pejalan kaki termasuk para difable. Beberapa hal yang harus diperhatikan adalah kenyamanan, yaitu, lebar jalur pedestrian, tidak licin, serta ubin yang masih layak dipakai. Selain itu, fasilitas bagi berkebutuhan khusus pun juga diperlukan.

Sedangkan sarana menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 03/PRT/M/2014 adalah fasilitas pendukung jalur pejalan kaki yang dapat berupa bangunan pelengkap petunjuk informasi maupun alat penunjang lainnya yang disediakan untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan pejalan kaki. Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait sarana jalur pedestrian adalah, drainase, jalur hijau, lampu penerangan, bollard, tempat sampah serta tempat duduk yang disediakan. Selain itu, marka dan perambuan pun juga merupakan aspek yang diperlukan.

1.8. Kerangka Berpikir

Pemerintah Daerah Yogyakarta melakukan kebijakan penataan kawasan khusus pedestrian. Penataan khusus tersebut dilakukan dengan merelokasi PKL pada ruas Selatan Malioboro atau Jalan Ahmad Yani ke Teras Malioboro. Dengan adanya relokasi ini sarana dan prasarana yang diberikan oleh pemerintah daerah juga menjadi suatu permasalahan yang dipertanyakan kelayakannya karena hal tersebut menjadi salah satu aspek

utama dalam relokasi. Setelah melihat sarana dan prasarana tersebut ternyata juga terdapat dampak yang dialami oleh PKL dan pedestrian. Berdasarkan analisa, dampak yang dirasakan PKL adalah terkait perekonomian sedangkan dampak yang dirasakan oleh pedestrian terkait kepuasan. Terdapat pedestrian yang merasa puas karena mendapatkan *space* ketika berjalan pada jalur pedestrian, tetapi terdapat juga yang merasa salah satu kearifan dari Malioboro telah hilang. Kemudian, setelah menganalisis unsur diatas pada akhirnya akan menilai efektivitas dari kebijakan tersebut beserta dengan sub dimensi dalam efektivitas kebijakan, yaitu pemahaman program, ketepatan target, ketepatan waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata.



1.9. Operasionalisasi Konsep

Tabel 1 Operasionalisasi Konsep

Konsep	Dimensi	Sub Dimensi	Indikator
Penataan Kawasan Khusus Pedestrian / Relokasi PKL di Malioboro	Sarana dan Prasarana	Kesediaan	Sarana dan prasarana yang mencukupi
		Kondisi	Sarana dan prasarana yang baik/layak
		Upaya Pengelolaan	Menanggapi/merespon keluhan yang ada
		Hambatan	Berbagai hal yang menghambat dalam pengelolaan
	Dampak Ekonomi Terhadap PKL	Pendapatan	Pengaruh kebijakan relokasi terhadap omset PKL
		Aktivitas ekonomi	Pengaruh kebijakan relokasi terhadap kegiatan jual beli bagi PKL
		Pengeluaran	Pengaruh kebijakan relokasi terhadap pengeluaran dalam melakukan bisnis bagi PKL
		Upaya Pengelolaan	Hal-hal yang dilakukan oleh pengelola untuk meningkatkan kualitas PKL, yaitu meningkatkan pendapatan, memiliki daya tarik, dan menekan pengeluaran PKL
		Hambatan	Berbagai hal yang menghambat dalam pengelolaan dan tindak lanjut pengelola
	Dampak Terhadap Kepuasan	Perasaan Pejalan Kaki	Perasaan yang dirasakan oleh pejalan kaki setelah dilakukan relokasi

	Pedestrian	Ruang Lalu Lintas Jalan	Pedestrian merasa lebih memiliki ruang ketika berjalan
		Tujuan Jalur Pedestrian	Pedestrian merasa lebih nyaman ketika berjalan
			Pedestrian merasa lebih aman ketika berjalan
			Pedestrian merasakan estetika dari jalur pedestrian
		Sarana dan Prasarana	Sarana berupa drainase, tempat sampah, lampu penerangan, tempat duduk, bollard, dan jalur hijau yang memadai
	Prasarana berupa lebar jalan, permukaan, dan fasilitas berkebutuhan khusus yang memadai		
	Efektivitas Kebijakan	Pemahaman kebijakan	Pihak-pihak yang terlibat dalam kebijakan memahami esensi atau tujuan kebijakan
			Cara memahami kebijakan tersebut
		Ketepatan target	Sasaran kebijakan yang direncanakan merasa terdampak dari kebijakan sesuai dengan
		Ketepatan waktu	Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan waktu yang ditetapkan
Momentum ketika dilakukan kebijakan tepat dengan situasi dan kondisi yang ada			
Tercapainya tujuan		Tujuan kebijakan dan keberhasilan tujuan tersebut	
Perubahan nyata	Perubahan apa yang dirasakan, utamanya		

			oleh sasaran kebijakan
--	--	--	------------------------

Sumber: Olahan Data Peneliti

1.10. Metode Penelitian

1.10.1. Desain Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif menurut (Creswell, 2016) jenis penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna di sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial. Jenis penelitian ini dapat menghasilkan suatu data yang dalam dan bahkan data yang belum diketahui secara luas. Dalam penelitian ini, metode kualitatif digunakan untuk menganalisis suatu hal dalam sekelompok orang tertentu.

Penelitian kualitatif ini dilakukan untuk menggali informasi secara mendalam agar menghasilkan data yang rinci. Metode kualitatif nantinya akan menghasilkan gambaran yang aktual dan akurat. Sehingga data yang dihasilkan bukanlah berupa angka, melainkan kata-kata atau kalimat. Metode kualitatif tersebut menggunakan teknik analisis data deskriptif untuk mendeskripsikan data-data kualitatif yang telah diperoleh terkait dimensi terkait. Sebab, penelitian ini ingin menjelaskan suatu fakta yang terjadi sebagaimana adanya terkait objek yang diteliti.

Jadi penelitian deskriptif kualitatif ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi sebanyak-banyaknya di lapangan terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan dengan pengolahan data untuk mendapatkan suatu simpulan terkait hasil data yang telah diperoleh.

Sehingga data yang telah diolah tersebut dapat dianalisa sesuai dengan tujuan penelitian ini. Hasil penelitian nantinya akan menjelaskan terkait gambaran pelaksanaan relokasi PKL Malioboro ke Teras Malioboro sesuai dengan rumusan masalah.

1.10.2. Lokasi dan Waktu

1. Lokasi

Lokasi dalam penelitian ini dilakukan pada ruas jalan Selatan Malioboro dan Teras Malioboro 1. Teras Malioboro 1 terletak di Jalan Margomulyo, Ngupasan, Kec. Gondomanan, Kota Yogyakarta. Adapun pemilihan lokasi tersebut berdasarkan pada beberapa pertimbangan sebagai berikut:

- a. Dengan bedanya kemantren antara Teras Malioboro 1 dengan 2
- b. Bedanya pemegang kewenangan Teras Malioboro 1 dan 2
- c. Adanya wacana pemindahan PKL Teras Malioboro 2 ke Teras Malioboro 1 untuk disatukan

Maka fokus subjek penelitian ini adalah para PKL di Teras Malioboro 1 untuk memudahkan dalam pengambilan data dan kontinuitas data.

2. Waktu

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2023 hingga Februari tahun 2024 dimulai untuk mengurus perizinan, mengumpulkan data-data (observasi dan wawancara), mengolah data, menganalisis data, hingga menghasilkan penelitian pada akhirnya.

1.10.3. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Pengambilan data menggunakan data primer sebagai sumbernya. Data yang diambil merupakan data dalam periode waktu penelitian ini dilakukan. Sehingga adanya kemungkinan terdapat dinamika yang tidak tertangkap dalam suatu periode tertentu ketika melakukan wawancara.

Sumber data primer adalah data penelitian yang didapatkan oleh peneliti secara langsung dengan berasal dari sumber atau objek utamanya. Sehingga dalam hal ini, peneliti sebagai pengumpul data secara langsung melalui wawancara. Selain itu, data primer juga diperoleh melalui observasi secara langsung. Sumber utama informan adalah:

- a. Pengelola Teras Malioboro 1 atau UPTD Balai Layanan Bisnis UKM, yaitu bagian Kasie Layanan Bisnis UMKM.

Informan: Kuntarta, S.Sos., M.A.P.

- b. Para PKL Teras Malioboro 1

PKL dalam hal ini adalah PKL yang dipindahkan atau direlokasikan oleh pemerintah ke Teras Malioboro 1 pada 1—7 Februari 2022. Jumlah PKL yang menjadi informan adalah 8 orang, yaitu:

Tabel 2 Subjek Penelitian Pedagang Teras Malioboro 1

No.	Nama	Jenis Dagangan	Letak	Paguyuban
-----	------	----------------	-------	-----------

1	Rubiyanti	Makanan (oleh-oleh khas Jogja)	Lantai 3 (Gedung A)	Papela
2	Binto (Iswadi)	Makanan (oleh-oleh khas Jogja)	Lantai 3 (Gedung A)	Papela
3	Asta	Fashion (kaos)	Lantai 3 (Gedung A)	PPKLY
4	Nur	Fashion (batik)	Lantai 2 (Gedung A)	Pemalni
5	Suyanto	Makanan (bakso)	Lantai 2 (Gedung B)	Handayani
6	Fauzi	Makanan (angkringan)	Selasar Gedung D	Papela
7	Ari	Makanan (sego berkat & pecel)	Selasar Gedung D	Papela
8	Winasis	<i>Craft</i> (kulit)	Lantai 2 (Gedung A)	Pemalni

Sumber: Olahan Data Peneliti

c. Para pedestrian

Pedestrian adalah orang yang merupakan pejalan kaki di ruas jalan selatan Malioboro (Jalan Malioboro dan Jalan Margomulyo) baik yang sedang berjalan saat penelitian dan pernah berjalan sebelum relokasi maupun orang yang pernah berjalan kaki di jalan tersebut ketika sebelum relokasi dan sesudah relokasi. Jumlah pedestrian yang menjadi narasumber adalah 4 orang, yaitu

Tabel 3 Subjek Penelitian Pedestrian Malioboro

No	Nama	Asal	Keperluan
1	Nadia	DIY	Magang di Malioboro selama 5 bulan terakhir
2	Ilyas	DIY	Mengantar dan memandu tamu asing ke Malioboro
3	Ayu	DIY	Mengisi waktu libur di Malioboro dalam beberapa hari
4	Diah	DIY	Jogging dan jalan pagi di sekitar Malioboro ketika <i>weekend</i>

Sumber: Olahan Data Peneliti

2. Data Sekunder

Pengambilan data juga menggunakan data sekunder sebagai sumbernya. Hal itu dilakukan dengan cara riset melalui sumber-sumber tertulis guna mengetahui data-data yang diperlukan, seperti berita terkait permasalahan relokasi tersebut dan mengetahui jumlah pedagang yang dipindahkan akibat adanya relokasi tersebut.

1.10.4. Teknik Penarikan Sampel

Dalam penelitian ini, Teknik penarikan sampel yang dilakukan adalah purposive sampel. Teknik purposive sampel adalah menggunakan sampel dengan cara memilih sampel secara spesifik berdasarkan kriteria tertentu (Sugiyono, 2011). Kriteria tersebut yaitu informan yang dianggap lebih memahami dan mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Sehingga sampel tersebut dapat memberikan informasi dan data yang dibutuhkan oleh peneliti. Jadi pemilihan sampel tersebut berdasarkan pengetahuan peneliti terkait sampel yang akan dipilih terlebih dahulu. Namun, peneliti juga dapat melakukan snowball sampling apabila diperlukan, yaitu data-data yang diperoleh melalui sampel yang telah ditetapkan masih belum menghasilkan informasi yang lengkap. Teknik snowball ini akan dilakukan jika sampel yang telah ditetapkan mengetahui siapa yang lebih mengetahui informasi yang ditanyakan. Sehingga peneliti dapat berganti kepada informan selanjutnya berdasarkan arahan dan masukan oleh sampel pertama.

1.10.5. Teknik Pengumpulan data

1. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara mendatangi Teras Malioboro 1 dan 2 serta ruas jalan Selatan. Kemudian dilakukan observasi melalui media sosial guna mengetahui terkait permasalahan dalam relokasi tersebut

2. Wawancara mendalam (*in depth interview*)

Wawancara dilakukan dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan terhadap informan secara langsung dan mendalam, yaitu pengelola, PKL, dan pedestrian. Wawancara dilakukan dengan menyiapkan kisi-kisi sebagai pedoman wawancara terlebih dahulu. Kisi-kisi wawancara tersebut berisikan daftar pertanyaan yang berkaitan dengan dimensi dalam rumusan masalah. Namun, wawancara dilakukan dengan gaya bebas untuk menggali informasi secara mendalam agar wawancara dapat berjalan dengan leluasa dan tidak *textbook*.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan sebagai data pendukung terkait kelayakan sarana dan prasarana dalam Teras Malioboro 1 dan 2 untuk menilai efektivitas relokasi tersebut.

1.10.6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah tindakan teknis dalam melakukan pengumpulan data secara terstruktur agar dapat mempermudah peneliti mendapatkan kesimpulan dari suatu hal yang diteliti. Proses

pengumpulan data tersebut didapatkan melalui hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain secara sistematis. Dengan demikian, hasil pengumpulan data tersebut dapat diinformasikan dan dipahami oleh orang lain (Sugiyono, 2009). Penelitian kualitatif ini dilakukan dengan Teknik analisis data interaktif. Teknik tersebut terdiri dari (Miles & Huberman, 1992):

1. Reduksi Data (pengumpulan data)

Reduksi data adalah proses pemilihan, fokus, pengabstrakan, penyederhanaan atas hal-hal yang tidak perlu atau data kasar untuk kemudian data diatur sebagaimana rupa. Proses reduksi data ini dilakukan secara terus-menerus selama proyek penelitian kualitatif berlangsung, mulai sejak awal proses penelitian. Jadi proses ini adalah seleksi data-data selama penelitian untuk melihat pokok-pokok temuan yang penting. Kemudian data-data tersebut diorganisasikan untuk mendapatkan kesimpulan yang final.

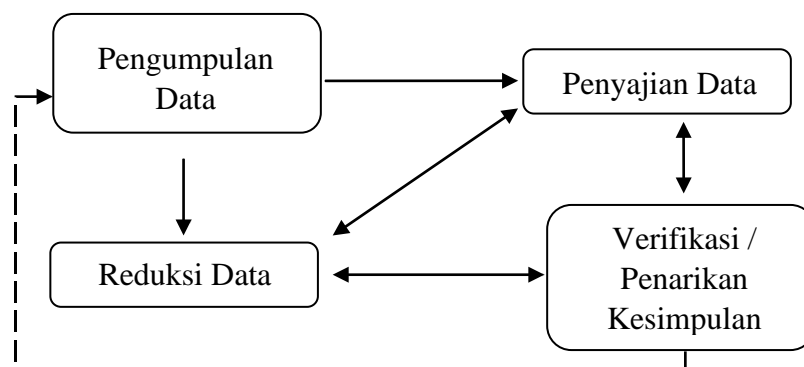
2. Data Display (penyajian data)

Penyajian data merupakan proses menyajikan data atau informasi secara sistematis yang memungkinkan terdapat penarikan kesimpulan yang bisa diambil. Sehingga dalam hal ini peneliti dapat melihat situasi yang terjadi untuk kemudian memutuskan menarik kesimpulan atau melanjutkan analisis. Dalam hal ini data disajikan secara sistematis berdasarkan cerita atau informasi logis yang didapatkan oleh peneliti dengan suntingannya agar makna peristiwanya dapat dipahami.

3. Concluding Drawing (Penarikan kesimpulan)

Setelah proses-proses pengumpulan data telah dilakukan maka pada akhirnya untuk menarik kesimpulan atas data-data yang telah diperoleh tersebut. Jadi, data-data yang telah ditemukan dan kemudian dianalisis untuk melihat kejelasan dengan hal yang diteliti sesuai dengan tema penelitian yang dibuat. Penarikan kesimpulan ini adalah hasil akhir pemikiran oleh peneliti berdasarkan data yang telah ditemukan melalui berbagai proses dan dianalisis. Sehingga proses ini memiliki landasan-landasan yang kuat agar kesimpulan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam Teknik analisis data interaktif ini, ketiga unsur tersebut dapat saling berkorelasi satu dengan lainnya berupa interaksi yang ada. Kemudian, peneliti tetap dapat berada diantara unsur-unsur selama proses pengumpulan data berlangsung. Ketiga interaksi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber: (Miles & Huberman, 1992)

1.10.7. Uji Validitas Data

Uji validitas dilakukan agar simpulan penelitian menjadi lebih kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Uji validitas merupakan pembuktian jika data yang diperoleh peneliti adalah data sebenar-benarnya sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Uji validitas ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu dengan teknik keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data itu (Moleong, 2002). Teknik triangulasi berarti peneliti untuk melihat dan menghasilkan kesimpulan dari berbagai sudut pandang agar tidak terjadi bias informasi. Sehingga kesimpulan yang dihasilkan nantinya merupakan kebenaran yang terjadi di lokasi penelitian.

Dalam hal ini, pengambilan data digunakan secara observasi dan wawancara. Sehingga teknik triangulasi ini dilakukan dengan cara observasi dan wawancara. Wawancara dalam triangulasi digunakan sebagai teknik untuk mendapatkan data yang diperoleh melalui sumber primer, yaitu PKL, pedestrian, dan pengelola. Sedangkan observasi dalam triangulasi ini digunakan oleh peneliti dengan cara melakukan observasi untuk membuktikan kredibilitas dan validitas data yang telah diperoleh melalui wawancara terhadap sumber primer tersebut.